KOTA MATARAM

RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH (RENPROJA) TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kota Mataram Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renproja BNN Kota Mataram Tahun 2020-2024 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Penyusunan renproja BNN Kota Mataram merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Penyusunan dokumen renproja ini telah melalui berbagai macam diskusi dan masukan dari masing-masing bidang yang ada di BNN Kota Mataram. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dari dokumen ini baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajian. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dokumen di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kota Mataram Tahun 2020-2024 kami susun. Semoga bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja instansi pemerintah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Mataram

Ivanto Aritonang, ST

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Kondisi Umum 1

B. Potensi dan Permasalahan 18

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL **21**

A. Tujuan Organisasi 21

B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional 22

BAB III RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN **25**

A. Rencana Kinerja 25

B. Rencana Kebutuhan Pendanaan 29

BAB IV PENUTUP **30**

Lampiran 1 Matrik Rencana Kinerja BN Kota Mataram Tahun 2020-2024 ..... **31**

Lampiran 2 Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan BNN Kota Mataram Tahun 2020-2024 ..... **34**

Lampiran 3 Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen BNN Kota Mataram Tahun 2020-2024 ..... **38**

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Kota Mataram pada periode 2020-2024.

Kota Mataram merupakan Ibu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan sektor pariwisata yang terus berkembang dan penduduk yang didominasi oleh usia kerja. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional. Kondisi tersebut juga mendorong tingginya angka kriminalitas di Kota Mataram.

BNN Kota Mataram melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dan Bidang Rehabilitasi. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba secara Komprehensif dan berkelanjutan agar para penyalahguna pulih dan produktif. Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah.

Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

BNN Kota Mataram harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan fungsinya di Wilayah Kota Mataram. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Mataram menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
2. Pelaksanan kerjasama dengan instansi terkait;
3. Memberikan layanan public dibidang upaya pemulihan/rehabilitasi dan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)
4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kota Mataram;
5. Penyusunan laporan BNN Kota Mataram;
6. Pelayanan administrasi BNN Kota Mataram;

Lebih jauh lagi, BNN Kota Mataram sangat berperan penting dalam melakukan sinergitas antara unit pemberantasan narkotika sehingga pelaksanaan pemberantasan narkotika dapat saling memperkuat dan mempercepat pencapaian target yang diinginkan.

A.1 Kondisi Geografi, Demografi, SDA dan Pemerintah Kota Mataram

Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak pada 08° 33’ - 08° 38’ Lintang Selatan dan 116° 04’ - 116° 10’ Bujur Timur. Struktur geologi Kota Mataram

sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuff yang merupakan endapan alluvial yang berasal dari kegiatan Gunung Rinjani, secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir.

Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 km dan 56,80 km perairan laut, terbagi atas 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang dan Sekarbela dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan. Batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Utara	Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
Timur	Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
Selatan	Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat
Barat	Selat Lombok

Iklim Seperti kota-kota lain di Indonesia, kota Mataram beriklim tropis dengan tipe iklim muson tropis (Am) yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.1 °C sampai dengan 31.6 °C. Kelembapan maksimum 83% terjadi pada bulan Januari–Maret dan Desember, sedangkan kelembapan minimum 77% terjadi pada bulan Agustus dan September. Rata-rata penyinaran matahari maksimum pada bulan September. Sementara jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 20 hari, dengan curah hujan rata-rata mencapai 1200–2000 mm per tahun, dan jumlah hari hujan relatif ≥120 hari per tahun.

Suku Sasak merupakan suku bangsa mayoritas penghuni Kota Mataram, selain Suku Bali, Tionghoa, Melayu dan Arab. Keharmonisan kehidupan antar suku di Mataram sempat terganggu oleh peristiwa pecahnya Kerusuhan Lombok 17 Januari 2000 yang menyeret isu agama dan ras sebagai penyebab kerusuhan.

Agama Kota Mataram merupakan kota yang multi etnis dan agama. Pengaruh budaya Sasak dan Bali, sangat terasa di kota ini. Adapun keberagaman penduduk kota Mataram menurut agama yang

dianut, berdasarkan data kementerian Dalam Negeri tahun 2021, yakni pemeluk agama Islam 82,67% yang umumnya dianut suku Sasak. Kemudian Hindu 13,99% dianut suku Bali, kemudian Kristen 2,36% di mana Protestan 1,54% dan Katolik 0,82%, yang kebanyak dianut penduduk dari Nusa Tenggara Timur, Batak dan Tionghoa. Sebagian lagi beragama Buddha yakni 0,98%, dianut masyarakat Tionghoa.

Masyarakat Kota Mataram sebagian menggunakan Bahasa Sasak dalam keseharian, selain Bahasa Indonesia, Bahasa Bali, Bahasa Samawa, serta bahasa Bima. Bahasa Sasak itu sendiri terbagi atas beberapa dialek, bergantung daerah masing-masing pengguna di Pulau Lombok, serta dapat digunakan sebagai acuan perbedaan strata sosial di masyarakatnya.

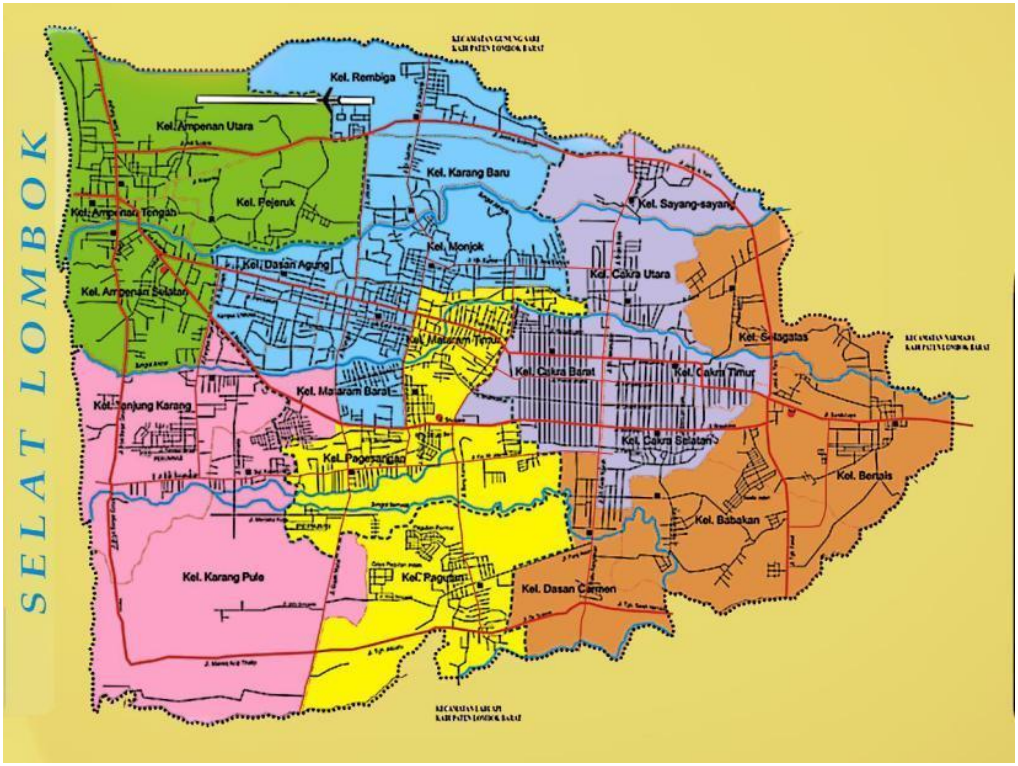

Gambar 1. Peta Kota Mataram

Kota Mataram yang terletak di Pualu Lombok yang eksotis, merupakan sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok. Kota Mataram saat ini dikembangkan menjadi salah satu kota pariwisata. Akomodasi dan penginapan di Kota Mataram terdapat beberapa hotel,

mulai dari hotel kelas Melati sampai Hotel Berbintang. Beberapa di antaranya adalah Hotel Lombok Raya, Hotel Grand Legi, Hotel Lombok Garden, Hotel Lombok Plaza, Hotel Santika Mataram, Hotel Nitour, Hotel Chandra, Hotel Mataram Square, Hotel Handayani dan Hotel Lombok Vaganza.

Tempat wisata Wisata Alam Pulau Lombok dengan pusat di Kota Mataram, merupakan tempat yang sangat terkenal dengan eksotisme alamnya. Dari kota ini anda bisa menuju tempat wisata alam yang sangat terkenal di antaranya Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Ampenan, Pesona Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yaitu Rinjani.

Wisata Budaya untuk wisata budaya, perpaduan antara budaya Lombok dan Bali dan sentuhan dari etnis lainnya, melahirkan suatu kolaborasi budaya yang sangat menarik, dan ada beberapa tempat menarik yang layak untuk dikunjungi terkait dengan hal tersebut antara lain, Kuburan Tionghoa Bintaro, Taman Mayura, Pura Meru, Pura Segara, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Loang Baloq, Kota Tua Ampenan, Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kota ini juga memiliki berbagai pusat perbelanjaan, misalnya Mataram Mall,Lombok Epicentrum Mall, Pusat Kerajinan Mutiara Pagesangan dan Ampenan Cerah Ceria. Disamping itu untuk anda yang suka belanja oleh-oleh Senggigi Square, Sukarara, Pusat Mutiara Di desa Sekarbela, bisa menjadi pilihan. Kuliner Kota ini menyajikan sajian khas Lombok di antaranya adalah ayam taliwang, beberuk terong, sate bulayak, plecing kangkung, nasi balap puyung, ares, sate rembiga, sate tanjung, poteng jaje tujak, iwel, dan bebalung.

BNN Kota Mataram Melalui Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2020, telah memetakan seluruh kelurahan dan desa di Kota Mataram dengan jumlah 50 Kelurahan dan 315 Linkungan yang tergambar dalam peta dibawah ini.

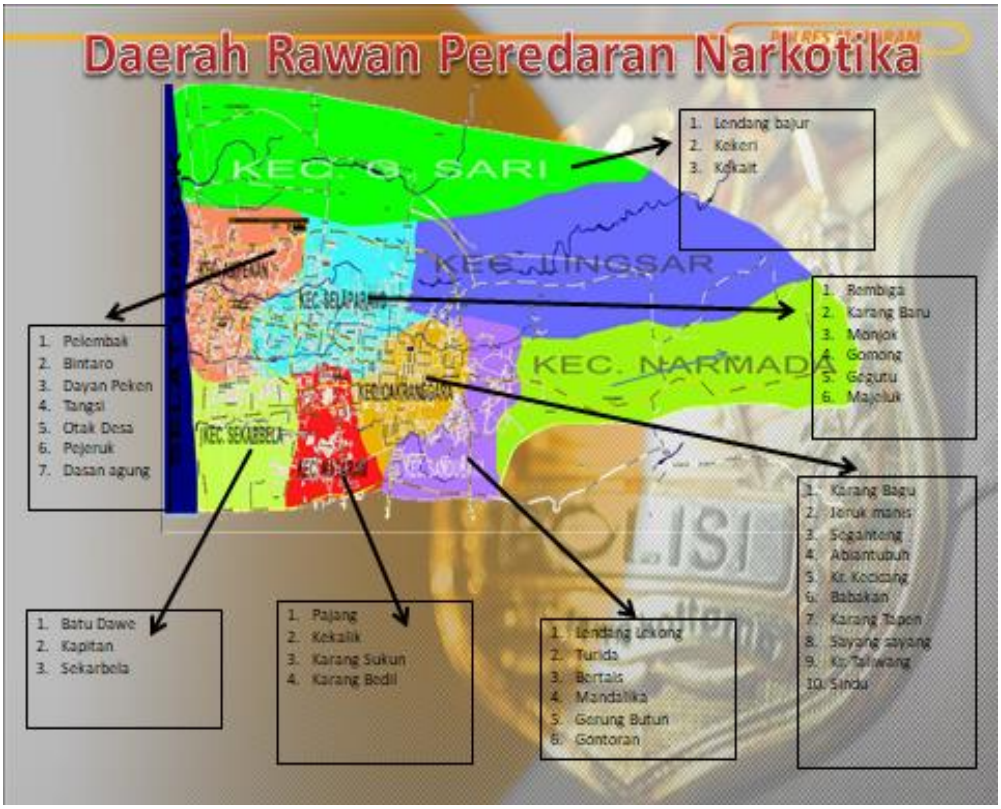

Tabel 1. Daerah Rawan dan Rentan Narkotika di Kota Mataram

A.2 Kondisi SDM di BNN Kota Mataram

Dalam rangka melindungi segenap masyarakat Kota Mataram dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, dibentuklah BNN Kota Mataram sebagai kepanjangan tangan BNN RI di daerah.

BNN RI membentuk BNN Kota Mataram sebagai perwakilan instansi vertikal di daerah pada bulan Maret tahun 2011.

Adapun struktur organisasi BNN Kota Mataram dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Koordinator dan Kelompk Jabatan Fungsional

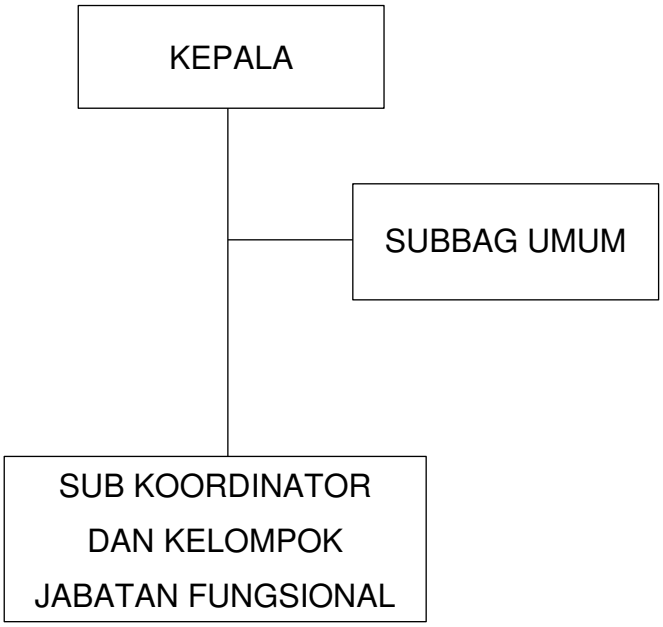

Gambar 3. Struktur Organisasi BNN Kota Mataram

BNN Kota Mataram didukung oleh berbagai sumber daya manusia yang kompeten didalamnya baik dari unsur PNS organik BNN, POLRI, dan Tenaga Kerja Kontrak. Adapun jumlah keselurahan SDM BNN Kota Mataram yaitu berjumlah 24 orang.

Jumlah SDM tersebut masih relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP) ideal untuk BNN Kabupaten/Kota. Berbagai upaya dilakukan oleh BNN Kota Mataram untuk mengatasi kekurangan SDM diantaranya mengajukan permohonan bantuan tenaga PNS Pemda dan Polisi di Polda NTB, mengoptimalkan SDM yang ada kedalam beberapa tugas sehingga pelayanan P4GN di daerah dapat berjalan secara maksimal.

A.3 Kondisi Sarana Prasarana Perkantoran BNN Kota Mataram

BNN Kota Mataram merupakan kepanjangan dari BNN RI secara kewilayahan. Wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Kota Mataram, BNN Kota Mataram resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak bulan Maret 2011. BNN Kota Mataram saat ini berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.99 Sayang-Sayang, Cakranegara Kota Mataram.

Bangunan yang ditempati sebagai Kantor BNN Kota Mataram saat ini merupakan Banguan milik sendiri yang dibangun oleh BNN RI diatas tanah seluas 1450 m2 yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Mataram sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya P4GN di Kota Mataram.

Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, BNN Kota Mataram juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa mobil tes urin keliling yang berisi peralatan penunjang dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkotika.

A.4 Kondisi Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kota Mataram

Sepanjang tahun 2020 di wilayah kerja BNN Kota Mataram telah merehabilitasi 158 orang dengan perincian 155 laki laki dan 4 perempuan dimana ada 49 diantaranya masih dibawah umur (<18 Tahun). Sementara untuk masyarakat Kota Mataram yang telah melakukan upaya rehabilitasi sebanyak 98 orang (96 laki laki dan 2 perempuan, sementara 29 diantaranya masih dibawah umur (<18 Tahun. Adapun pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polres Kota Mataram adalah sebanyak 104 orang tersangka dengan perincian ada 96 Laki-laki dan 8 perempuan.

Tabel Jumlah Layanan Klien di Klinik
Menurut Golongan Umur di Klinik Pratama
BNN Kota Mataram Tahun 2020

NO	KAB./ KOTA	TAHUN 2020					
		PENGGUNA NARKOBA					Jumlah
		10 - 16	17 - 18	19 - 24	25 - 34	35+	
1	KOTA MATARAM	11	18	29	30	10	98
2	KAB. LOMBOK BARAT	12	2	18	4	5	41
3	KAB. LOMBOK TENGAH	1	4	4	1	1	11
4	KAB. LOMBOK TIMUR	1	0	3	0	1	5
5	KAB. LOMBOK UTARA	0	0	0	1	1	2
6	KAB. SUMBAWA BARAT	0	0	0	0	0	0
7	KAB. SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
8	KAB. DOMPU	0	0	0	0	1	1

9	KAB. BIMA	0	0	0	0	0	0
10	KOTA. BIMA	0	0	0	1	0	0
	JUMLAH	25	24	54	37	19	159

Dari Tabel tersebut diatas terlihat Penyalahguna Narkotika yang melakukan upaya rehabilitasi pada tahun 2020 sebagian besar adalah usia Produktif, sementara untuk Usia anak (<18) Tahun sebesar 30 %. Hal ini Cukup memprihatinkan.

Tabel Jumlah Layanan Klien di Klinik
menurut Jenis Kelamin di Klinik Pratama
BNN Kota Mataram Tahun 2020

.NO	KAB./ KOTA	TAHUN 2020		
		PENGGUNA NARKOBA		
		L	P	JUMLAH
1	KOTA MATARAM	96	2	98
2	KAB. LOMBOK BARAT	40	1	41
3	KAB. LOMBOK TENGAH	10	1	11
4	KAB. LOMBOK TIMUR	5	0	5
5	KAB. LOMBOK UTARA	2	0	2
6	KAB. SUMBAWA BARAT	0	0	0
7	KAB. SUMBAWA	0	0	0
8	KAB. DOMPU	1	0	1
9	KAB. BIMA	0	0	0
10	KOTA. BIMA	1	0	1
	JUMLAH	155	4	159

Dari Tabel tersebut diatas terlihat penyalahguna yang mengikuti Proses rehabilitasi sebagian besar adalah berjenis kelamin Laki laki 97% dari keseluruhan klien

A.5 Kondisi Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Provinsi NTB

Berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (rutan) di Provinsi NTB sebanyak 60 persen pelaku kriminal di dominasi kasus narkoba.

Dukungan dari Pemerintah daerah sangat diperlukan guna menghasilkan berbagai produk yang terbaik untuk menekan peredaran narkoba di daerah. Instansi pemerintah merupakan elemen penting yang harus memperhatikan kebersihan dari penyebaran narkoba.

NO	LAPAS/RUTAN	KAPASITAS	TAHANAN & NAPI	NAPI & TAHANAN NARKOBA				
				LAHGUN	PENGEDAR	BANDAR	TAHANAN	TOTAL
1	LAPAS KELAS II A MATARAM	666	1,237	35	443	3	190	671
2	LAPAS KELAS II A SUMBAWA BESAR	250	487	10	170	10	48	238
3	LAPAS KELAS II B DOMPU	148	348	12	117	0	11	140
4	LAPAS KELAS II B LOMBOK TENGAH	57	29	0	0	0	0	0
5	LAPAS KELAS II B SELONG	139	306	10	105	0	11	126
6	LPKA KELAS II A LOMBOK TENGAH	72	28	1	0	0	0	1
7	LAPAS PEREMPUAN MATARAM	115	115	4	63	1	19	87
8	RUTAN KELAS II B RABA BIMA	135	289	42	44	0	16	102
9	RUTAN KELAS II B PRAYA	92	253	14	75	0	22	111
10	RUTAN POLDA NTB		80	0	0	0	15	15
11	RUTAN BNNP NTB		12	0	0	0	12	12
JUMLAH		**1,674**	**3,184**	**128**	**1,017**	**14**	**344**	**1,503**

Tabel 4. Kondisi Penghuni Lapas Kasus Narkotika di wilayah Provinsi NTB

A.6 Kondisi Fasilitas Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Komponen Masyarakat (LRKM) di Wilayah Kota Mataram

Fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat yang operasional adalah fasilitas rehabilitasi yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi (rawat inap dan atau rawat jalan) korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan mendapat dukungan dari instansi pemerintah dan donor lain.

Di wilayah Kota Mataram terdapat 5 fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah, Namun yang operasional menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika hanya 3 lembaga, yaitu di RSJ Mutiara Sukma Prov. NTB, Klinik Pratama BNNP NTB dan Klinik Pratama BNN Kota Mataram. Sementara itu ada 2 IPWL namun tidak operasional yaitu Klinik Bidokes Polda NTB dan RS. Bhayangkara.

Sementara itu untuk Layanan Rehabilitasi Komponen Masyarakat di wilayah Kota Mataram ada 4 Lembaga yaitu AKSI NTB, INSET, Yayasan LENTERA dan RSI Siti Hajar. Namun Hanya 2 yang saat ini operasional melayani upaya rehabilitasi.

DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI YANG ADA DI WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2020

No	NAMA LEMBAGA	JUMLAH KLIEN	KETERANGAN
1	RSJ. MUTIARA SUKMA	226	LRIP
2	Rs. BHAYANGKARA	0	LRIP
3	RSI SITI HAJAR	0	LRKM
4	BIDOKES POLDA NTB	0	LRIP
5	KLINIK PRATAMA BNNP NTB	333	LRIP
6	KLINIK PRATAMA BNN KOTA MATARAM	158	LRIP
7	YAYASAN LENTERA	70	LRKM
8	AKSI NTB	67	LRKM
9	INSET	0	LRKM

Hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Hasil survei menunjukan bahwa mayoritas pecandu yang telah mengikuti rehabilitasi masih relapse atau menggunakan narkoba kembali dan juga adanya Droup Out klien dari upaya pemulihan.

A.7 Kondisi Capaian dan Evaluasi Kinerja BNN Kota Mataram

Permasalahan narkoba di Kota Mataram harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Kota Mataram yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram yang terus meningkat. Apalagi dengan adanya sitausi perekonomian yang belum normal karena dampak dari COVID19 sehingga orang melakukan jalan pintas untuk menjual atau menjadi pengedar Narkotika. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Melihat kenyataan tersebut diatas BNN Kota Mataram menindaklanjuti sasaran pembangunan tersebut melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk menekan sisi membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui:

- Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- Mengoptimalisasi peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba.
- Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan penekanan baik sisi *demand* ataupun *supply*. Pada tataran implementasi, kegiatan pencegahan dan pemberantasan tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi berikut :

- **Mendorong semua Kabupaten / Kota di Kota Mataram untuk menyusun Perda P4GN di daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengamanatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota untuk menyusun penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN. Pada tahun 2020 tepatnya 23 Desember 2020, Pemerintah Provinsi NTB telah mengundangkan Pergub No 78 Tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN. BNNP NTB bersama- sama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong semua Kabupaten/ Kota untuk menyusun Perda P4GN agar P4GN di daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dengan adanya Perda P4GN di daerah diharapkan dapat mendorong :

1) Penyusunan Rencana Aksi P4GN di daerah
2) Pembentukan tim terpadu P4GN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Sampai dengan saat ini masih banyak Kabupaten / Kota di Provinsi NTB yang belum menindaklanjuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Beberapa daerah masih dalam tahapan penyusunan Perda. Misi Provinsi NTB keenam yaitu “NTB Berkah dan Aman” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah merupakan peluang untuk mendorong optimalisasi P4GN di daerah.

- **Penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tupoksi penyelenggaraan P4GN di daerah yang berfokus pada upaya pencegahan. Tupoksi ini dijalankan oleh Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu BNNP NTB perlu meningkatkan kerjasama dengan Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di NTB.

- **Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat**

Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk

meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

- **Mendorong pembentukan rumah edukasi anti narkoba di setiap kota/kabupaten**

Sebagai bagian dari kampanye gerakan anti narkoba, BNN akan mendorong pembangunan rumah edukasi anti narkoba di setiap Kabupaten/Kota dengan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah edukasi gerakan anti Narkoba dapat dipergunakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahaya Narkoba baik tubuh, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif yang inspiratif, pengembangan potensi dan kemampuan, dan menjadi pusat pendidikan karakter.

- **Mendorong pembentukan desa bersinar**

Pembentukan desa bersinar merupakan salah satu amanat dari Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2020 – 2024. Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 merencanakan pembentukan desa bersinar sebanyak 10 desa setiap tahunnya. BNN bersama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong terwujudnya desa bersinar tersebut dan diprioritaskan pada daerah rawan dan rentan narkoba di Provinsi NTB. Selanjutnya BNNP NTB dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota perlu mendorong desa/kelurahan di Provinsi NTB untuk mengalokasi anggaran P4GN dalam APBDes- nya serta meningkatkan pendampingan pembentukan desa bersinar. Provinsi NTB memiliki 1.146 desa/kelurahan.

- **Inovasi dalam kampanye / sosialiasi anti narkoba**

Kampanye / sosialisasi anti narkoba perlu terus dilakukan inovasi seperti dengan penggunaan media sosial, vlog, lomba poster anti narkoba, cerdas

cermat anti narkoba, cipta lagu anti narkoba lomba pembuatan film pendek atau vlog. Inovasi dapat diarahkan kepada pendekatan TIK mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

- **Penguatan peran serta masyarakat**

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah narkoba adalah masih rendahnya peran serta masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk :

1) Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
2) Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
3) Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN.
4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penggiat dan relawan anti narkoba. Pada tahun 2019, Provinsi NTB memiliki 153 penggiat dan 250 relawan. Jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan peningkatan kasus narkoba di NTB.
5) Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba.

Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat di BNN Provinsi NTB mengalamai perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena komitmen masyarakat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi dalam penanganan permasalahan narkoba di provinsi NTB. Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pemerintah, BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,58 dengan kategorisasi Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN yang mengharuskan setiap Instansi Lingkungan Pemerintah Menyiapkan Rencana, Anggaran dan Melaksanakan Inpres Tersebut.

Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Masyarakat, BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,48 dengan kategori Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya keaktifan aparatur

perangkat desa dan kebijakan pemerintah daerah yang mulai menganggarkan pelaksanaan tes urine kepada warga atau masyarakat.

Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pendidikan, BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,40 dengan kategori Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Keaktifan Sekolah untuk mengajukan MOU *(Memorandum Of Understanding)* dan Deteksi Dini Melalui Pelaksanaan Tes Urine Di lingkungan Pendidikan. Kemudian pada Lingkungan Swasta, BNNP NTB dan Jajaran Mendapatkan Nilai 3,35 dengan kategori Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya keaktifan dan Peran Serta Dunia Usaha dalam Mendukung Program P4GN, Seperti Pelaksanaan Sosialisasi dan Tes urine serta Pengajuan MOU *(Memorandum Of Understanding)* demi menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Produktif.

PERHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
T.A 2020

NO	INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPATIF (IKP)	BNNP NTB	BNNK MATARAM	BNNK SUMBAWA BARAT	BNNK SUMBAWA	BNNK BIMA	JUMLAH	NILAI	KATEGORI
1	LINGKUNGAN PEMERINTAH	3.57	3.77	3.5	3.5	3.57	17.91	3.58	Sangat Mandiri
2	LINGKUNGAN MASYARAKAT	3.86	3.34	3.51	3.42	3.26	17.39	3.48	Sangat Mandiri
3	LINGKUNGAN PENDIDIKAN	3.55	3.31	3.4	3.5	3.26	17.02	3.40	Sangat Mandiri
4	LINGKUNGAN SWASTA	3.71	3.23	3.2	3.2	3.38	16.73	3.35	Sangat Mandiri
NILAI		14.69	13.65	13.61	13.62	13.48		13.81	
INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPATIF		3.67	3.41	3.40	3.41	3.4			
KATEGORI		Sangat Mandiri	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri			

Tabel 7. Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di wilayah Provinsi NTB
Sumber : LKIP BNNP NTB Tahun 2020

b. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui upaya Rehabilitasi bertujuan Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan berbagai kegiatan diantaranya :

1) Pelatihan Petugas rehabilitasi berbasis Masyarakat dengan melatih agen Pemulihan agar mampu melaksanakan rehabilitasi di Unit IBM.

2) Memberikan layanan rehabilitasi kepada para penyalahguna Narkotika secara komprehensif dan berkelanjutan dengan Motto CARE (Commit, Available, Responsive dan Efektive).
3) Meningkatkan Lembaga Layanan rehabilitasi baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat serta IBM baik secara kualitas maupun kuantitas.
4) Meningkatkan layanan penerbitan SKHPN secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
5) Memberikan layanan Asesment terpadu atas permintaan penegak hukum secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel

Upaya pelayanan Rehabilitasi di BNN Kota Mataram setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin hari semakin sadar bahwa upaya rehabilitasi merupakan salah satu upaya penanganan permasalahan di bidang narkotika. Selain itu juga menunjukan bahwa BNN Kota Mataram telah dikenal dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika.

Dalam rangka meningkatkan aksesbility layanan rehabilitasi sampai ke masyarakat bawah BNN Kota Mataram selain membentuk Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, juga telah membentuk Unit IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) sampai di tingkat Kelurahan. Dengan terbentuknya IBM yang dibentuk oleh, dari dan Untuk masyarakat itu sendiri masyarakat tidak malu dan mudah untuk mendapatkan layanan.

Untuk itu BNN Kota Mataram melakukan upaya pemetaan, monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga rehabilitasi termasuk pada Unit IBM Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga rehabilitasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas peyanan lembaga rehabilitasi kepada masyarakat.

Meskipun secara kuantitatif upaya penguatan lembaga rehabilitasi telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan, salah satunya adalah banyaknya LRKM yang tidak opersaional, salah satunya sejak tidak adanya dukungan pembiayaan dari BNN RI. Permaslahan lain sejak adanya PP no. 4 Tahun 2020 dimana Kementerian

Kesehatan melalui BPJS sudah tidak menanggung pembiayaan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika kecuali yang memegang BPJS BIP.

Capaian kinerja BNN Kota Mataram secara keseluruhan atas arah kebijakan dan srategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Kota Mataram kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kota Mataram yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

a. Meningkatnya komitmen dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
b. adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat di daerah;
c. perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi dan kolaborasi melalui pelibatan banyak instansi penegak hukum.
d. Adanya Perda Kota Mataram No. 5 Tahun 2020 tentang P4GN sehingga memberi payung hukum dalam pelaksanaan P4GN di Kota mataram.
e. Meningkatnya pemahaman penegak hukum dibidang narkotika terkait masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk adanya regulasi yang memihak pada upaya rehabilitasi seperti Perpol No. 8 Tahun 2020 dan TR Kapolri terkait restroaktif Justice.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kota Mataram, dimana permasalahan-

permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Mataram adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Problematika pengawasan peredaran.
   Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:
   1) Kurangnya SDM dalam upaya penindakan, di BNN Kota Mataram belum ada tenaga di bagian seksi pemberantasan/penyidik.
   2) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
   3) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
   4) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.
   Walau sudah ada Perda terkait P4GN namun dalam pelaksanaan di lapangan belum berjalan secara optimal. Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:
   1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
   2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
   3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
   4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung individualis dan kurangnya awarnes bahkan menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.

5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
2) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan atau pecandu belum semua memahami adanya retroaktif justice sehingga proses rehabilitasi belum berjalan optimal.
3) Adanya regulasi yang menghambat proses akan melakukan upaya rehabilitasi misalnya dengan adanya PMK No. 4 Tahun 2020 dimana saat ini yang mendapatkan layanan rehabilitasi secara gratis dari kementerian kesehatan lewat BPJS hanya yang mempunyai kartu BPJS BIP.
4) Adanya regulasi dari BNN RI dimana saat ini sudah tidak lagi memberi pembiayaan bagi LRKM sehingga banyak LRKM yang tidak operasional.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN Kota mataram sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. **Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Kota Mataram dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.**

   Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba.

   Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

   Dari sisi Harm Reduction bagaimana memberikan layanan rehabilitasi secara kmprehensif dan berkelanjutan menuju pemulihan ketergantungan dan produktif di masyarakat.

2. **Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.**

   Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporosional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

   Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kota Mataram sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Mataram merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kota Mataram juga menyelarasakan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Permasalahan narkoba di Kota Mataram harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Kota Mataram yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Mataram dan NTB yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia menjadi salah satu fokus pembangunan negara oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam statemennya di salah satu pidato kenegaraan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa “Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika”.

Gambar 6. Statement Presiden dan Wakil Presiden RI

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara atau internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam penanganan kejahatan narkotika di Kota Mataram, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kota Mataram sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Mataram sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, termasuk kelurahan dan lingkungan rawan narkoba.

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
3. Peningkatan pemberdayaan, partisipasi dan daya tanggap masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
4. Meningkatkan peran Kelurahan bersinar dan Kelurahan Tangguh anti Narkoba sebagai pilot project upaya P4GN secara mandiri.
5. Peningkatan fasilitas rehabilitasi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba;
6. Penguatan jaringan kerjasama kelembagaan, hokum, inovasi dan teknologi;
7. Penataan dan penguatan kelembagaan untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan publik BNN Kota Mataram

BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Kota Mataram menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan BNN RI ke unit kerja BNN Provinsi kemudian ke BNNK/Kota.

Rencana kinerja yang disusun BNN Kota Mataram selama periode 2020-2024 telah sesuai dengan Rencana Strategis BNN RI tahun 2020-2024 dan Visi dan Misi Walikota Mataram dalam rangka mewujudkan "Mataram Harum" Mataram yang Harmonis, Aman, Ramah, Unggul, serta Misi yang Pertama dan Kedua yaitu Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter, Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan, salah satunya melalui program Kampung Sehat Bersinar (Bersih Narkoba) Berbagai kegiatan yang akan dilakukan BNN Kota Mataram dalam rencana kinerja periode 2020-2024 antara lain :

1. Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN Kota Mataram memiliki tugas meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pengelolaan Infomasi dan Edukasi *(Program Prioritas Nasional)*

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rencana kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi yang dilakukan oleh BNN Kota Mataram pada periode tahun 2020-2024 antara lain :

a.1. Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni

a.2. Informasi dan Edukasi Melalui Isert Konten

a.3. Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang

a.4. Informasi dan Edukasi Melalui Placement (Penayangan) Televisi Daerah

a.5. Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio lokal/daerah

a.6. Dialog Interaktif Remaja

b. Kegiatan Penyelenggaran Advokasi *(Program Prioritas Nasional)*

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram memiliki tugas meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat *(Program Prioritas Nasional)*

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

3. Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Bidang rehabilitasi BNN Provinsi NTB memliki tugas meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika. Pengembangan fasilitas rehabilitasi dilakukan melalui program bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Peningkatan kapasitas kepada tenaga rehabilitasi dilakukan melalui pemberian pelatihan serta sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi. BNN Kota Mataram juga mendorong masyarakat melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) untuk menjadi agen pemulihan BNN dalam upaya mendorong korban penyalahgunaan narkoba yang ada di desa atau wilayahnya untuk lapor diri ke BNN agar mendapatkan rehabilitasi.

c. Kegiatan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengolahan data dalam rangka pembinaan lanjut, bimbingan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi

d. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna da-tau Pecandu Narkoba

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN. Pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba dilakukan dengan berbagai program, antara lain : pendampingan pemulihan, layanan rehabilitasi rawat jalan, dan monitoring evaluasi fasilitas rehabilitasi.

e. Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atas penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari pendapatan atas penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh masyarakat yang membutuhkan surat keterangan untuk keperluan sekolah atau masuk kerja.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Kota Mataram Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kota Mataram merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Mataram

Adapun rencana target kinerja BNN Koya Mataram Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi NTB tahun 2020-2024 sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Kota Mataram Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024.

Renproja BNN Kota Mataram Tahun 2020-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja sec ara kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024. Renproja BNN Kota Mataram yang dirumuskan untuk periode 2020-2024 mengusung Visi: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

   Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada:

   (1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba.
   (2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Kota Mataram Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja BNN Kota Mataram secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kota Mataram
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Wilayah dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kota Mataram	-	50	50	50	50
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Wilayah dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kota Mataram	-	78,67	78,67	78,67	78,67
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Wilayah dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kota Mataram	-	3,41	3,41	3,41	3,41
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	-	-	-	-
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	5	10	15	20
			Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	1	1	1	1

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika Meningkatkan pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi penyalahgunaan Narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kota Mataram	-	1	2	3	4
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Mataram.	-	3,2	3,25	3,3	3,3
			Jumlah Tersangka yang mendapatkan Rekomendasi TAT	-	5	10	15	20
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	-	-	-	-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	-	-	-	-
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	-	-	-	-
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	-	-	-	-
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan		Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mataram	-	90	91	92	93

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-	-	-	-
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	94	95	96	97
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-	-	-	-

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Wilayah dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kota Mataram	-	**122.769.000**	**68.000.000**	**150.000.000**	**250.000.000**
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Wilayah dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kota Mataram	-	**53.580.000**	**106.000.000**	**150.000.000**	**200.000.000**
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kota Mataram	-	**230.580.000**	**221.400.000**	**250.000.000**	**300.000.000**
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-				

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	**12.790.000**	**25.580.000**	**38.370.000**	**51.160.000**
			Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	**5.350.000**	**5.350.000**	**5.350.000**	**5.350.000**
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika Meningkatkan pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi penyalahgunaan Narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kota Mataram	-	**13.575.000**	**27.150.000**	**40.725.000**	**54.300.000**
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Mataram.	-	**152.208.000**	**167.428.000**	**184.170**	**202.587.000**
			Jumlah Tersangka yang mendapatkan Rekomendasi TAT	-	**19.625.000**	**39.250.000**	**58.8753.000**	**78.500.000**
7.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	-	-	-	-
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	-	-	-	-
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	-	-	-	-
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mataram	-	**818.871.000**	**922.865.000**	**1.000.000.000**	**1.100.000.000**
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-	-	-	-
12.	Pembinaan Administrasi dan	Meningkatnya tata kelola administrasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP		**77.555.000**	**93.759.000**	**100.000.000**	**110.000.000**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Keuangan	keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-	-	-	-

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Kota Mataram
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah Wilayah dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kota Mataram	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah Wilayah dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kota Mataram	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan Teknis
				Pemetaan Kelompok Sasaran di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Monev Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba
				Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Pengembangan Kapasitas pada Kawasan Rawan Narkoba
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	Monev Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	
		Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	Pelatihan Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP 3. Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional di Wilayah Kota Mataram 4. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Monitoring Petugas Rehabilitasi
				Layanan Rehabilitasi di Klinik BNN Kota Mataram
				Layanan IBM
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Layanan SKHPN
			Koordinasi Kelembagaan	Rapat Koordinasi Kelembagaan
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Pemetaan dan Koordinasi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	5. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kota Mataram		
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi Jumlah Tersangka yang mendapatkan Rekomendasi dari TAT	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Pembentukan Unit IBM Supervisi dan Asistensi Operasional Unit IBM
			Pelaksanaan Asesmen Terpadu	Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahgunaan Narkotika
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	- - -
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	-	-
8.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	-
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	- -
9.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran Kota Mataram	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan RKA
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Penyusunan Laporan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
		2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target		
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
				Monitoring dan Evaluasi
			Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
				Operasional Perkantoran